Indikator
Ketenagakerjaan
Katalog: 2302003.8202
2017
Kabupaten
Halmahera Tengah
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Indikator Ketenagakerjaan

2017

Kabupaten Halmahera Tengah

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017

No. ISBN	**:**
No. Katalog	**:** 2302003.8202
No. Publikasi	**:** 82020.1901
Ukuran Buku	**:** 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	**:** xii + 41 halaman

Naskah	**: BPS Kabupaten Halmahera Tengah**
Penyunting	**: BPS Kabupaten Halmahera Tengah**
Desain Kover	**: BPS Kabupaten Halmahera Tengah**
Diterbitkan Oleh	**: © BPS Kabupaten Halmahera Tengah**
Dicetak Oleh	**: CV. Tara Taro**

TIM PENYUSUN

Indikator Ketenagakerjaan
Kabupaten Halmahera Tengah 2017

Pengarah :
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Umum:
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Teknis:
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penyunting:
Muhammad Arif Maulana, SST

Penulis :
Iin Sukowati, SST

Pengolah Data:
Iin Sukowati, SST

Desain:
Cahya Danu Rahman, SST

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menyediakan suatu *early warning system* terhadap perencanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik melakukan pengumpulan data ketenagakerjaan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) secara berkala (semesteran dan tahunan).

Publikasi ini hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Data-data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengumpulan data Sakernas Agustus 2017 di Kabupaten Halmahera Tengah. Di dalam publikasi ini disajikan indikator-indikator utama ketenagakerjaan beserta analisis ringkas terhadap data-data tersebut. Diharapkan berbagai data yang telah dihasilkan tersebut dapat memberi input yang berharga bagi pemerintah dalam merumuskan perencanaan pembangunan utamanya di bidang ketenagakerjaan.

Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini, khususnya kepada para petugas lapangan Sakernas yang telah bekerja keras dalam pengumpulan data, serta para responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk keperluan wawancara.

Weda, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Halmahera Tengah,

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Umum

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang bertujuan untuk memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia.

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran, dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Sakernas pertama kali dilaksanakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986-1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan di seluruh provinsi di Indonesia, baru sejak tahun 1994-2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002-2004, di samping Sakernas Tahhunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan. Pada tahun 2005 -2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (Semesteran I) dan Agustus (Semester II).

Kemudian pada 2011-2014 Sakernas kembali dilaksanakan secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV). Sakernas Triwulanan ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia, yaitu mengacu pada KILM (*The Key Indicators of the Labour Organization*). Mulai tahun 2015, Sakernas dikembalikan lagi menjadi format semesteran, yaitu pada bulan Februari (semester I) dan Agustus (semester II) dengan jumlah sampel nasional sebanyak 50.000 rumah tangga dan estimasi data sampai pada level provinsi. Pada pelaksanaan Sakernas Agustus terdapat penambahan sampel sebanyak 150.000 rumah tangga, sehingga total sampel Sakernas Agustus 200.000 rumah tangga dengan estimasi data sampai level kabupaten/kota.

Di Kabupaten Halmahera Tengah, sampel dialokasikan sebanyak 4 blok sensus (semesteran) dan tambahan sebanyak 12 blok sensus untuk tahunan, sehingga total terdapat 160 rumah tangga (10 rumah tangga per blok sensus) yang menjadi target sampel Sakernas Agustus 2017 di Kabupaten Halmahera Tengah.

Dari setiap rumah tangga sampel tersebut, dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, dan status perkawinan (khusus untuk 10 tahun ke atas). Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas, akan ditanyakan keterangan mengenai status pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak terpilih dalam sampel.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan buku ini adalah menyajikan data hasil Sakernas Agustus 2017 dalam bentuk ulasan dan grafik serta tabel yang lebih ringkas untuk memudahkan pengguna data dalam memahami data pokok yang dihasilkan.

1.3 Cakupan

Pembahasan hasil Sakernas Agustus 2017 dalam publikasi ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan yaitu partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator pengangguran dengan rincian menurut jenis kelamin dan klasifikasi wilayah.

1.4 Penjelasan Teknis

Konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas merujuk pada rekomendasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*-ILO). Hal ini dilakukan agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dapat dibandingkan secara internasional, tentunya tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia. Konsep ini membagi penduduk menjadau dua kelompok, yatu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
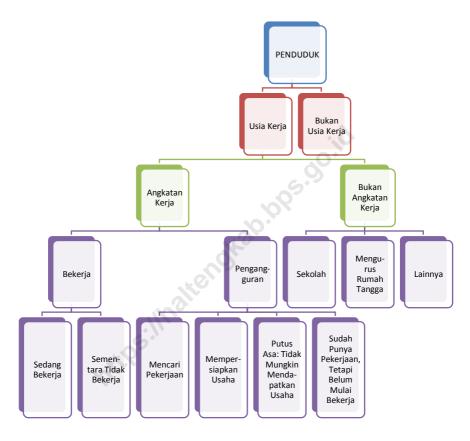
Gambar 1. Diagram Ketenagakerjaan

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survey dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas usia kerja. Di negara lain penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai kebutuhan/situasinya.

Periode referensi yang diterapkan dalam Sakernas adalah seminggu yang lalu berakhir satu hari sebelum pencacahan. Dalam survey rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya.

Konsep/definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization* (ILO) sebagaimana tercantum dalam buku "*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment", an ILO Manual On Concept and Methods, ILO 1992*. Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*).

Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, usia kerja, periode referensi dan kriteria satu jam.

1. **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografis selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar

ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*) yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu.

2. **Usia kerja** adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja 15 tahun dan tanpa batas atas usia kerja. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan Sakernas, pengumpulan informasi dilakukan mulai terhadap yang berusia 10 tahun. Hal ini dilakukan untuk menyediakan data terkait pekerja anak/di bawah umur. Penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi antar negara tergantung kebutuhan dan situasi ketenagakerjaan di masing-masing negara. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia dan Amerika Serikat (16 tahun). Sementara, negara-negara yang menerapkan batas atas misalnya Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, Meksiko (65 tahun).
3. **Angkatan kerja** terdiri dari penduduk usia kerja yang bekerja, penduduk yang sementara tidak bekerja, dan penduduk yang

menganggur. Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mecakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya yang dicakup disini adalah kegiatan yang berrsifat aktif dan tidak termasuk tidur, bermalas-malasan, santai, bermain dan tidak melakukan kegiatan apapun.

4. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Penghasilan/keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Termasuk ke dalam konsep bekerja adalah orang yang sementara tidak bekerja yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak berkerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, tugas belajar, atau mogok kerja.

5. **Pengangguran** meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja atau sudah mempunyai usaha tapi belum memulainya. Yang

dimaksud **mencari pekerjaan** adalah kegiatan dari seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan secara aktif dalam kurun waktu seminggu yang lalu. **Mempersiapkan usaha baru** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru' (bukan merupakan pengembangan suatu usaha) selama seminggu yang lalu, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila orang tersebut telah melakukan 'tindakan nyata' seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha dan sebagainya, kegiatan tersebut telah/sedang dilakukan. **Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa)** adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau seseorang yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. **Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja** adalah alasan bagi mereka yang tidak mencari pekerjaan kerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Orang yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja pada saat pencacahan tidak dikategorikan sementara tidak bekerja.

6. **Periode referensi** merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat dan juga mengurangi masalah statistik yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja, termasuk Indonesia.

   Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga digunakan Kriteria Satu Jam. **Kriteria Satu Jam** digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk didalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work* dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria Satu Jam juga penting untuk membatasi bekerja dan menganggur. Esensi dari pengangguran adalah ketiadaan pekerjaan secara total. Menaikkan kriteria bekerja berturut-

turut hingga di atas satu jam akan membuat kabur/kesulitan dalam membedakan mereka yang bekerja secara tidak beraturan (jam kerjanya tidak tentu) dengan mereka yang benar-benar tidak punya pekerjaan. Berdasarkan argumen teknis tersebut, BPS menggunakan konsep/definisi "bekerja paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu" untuk mengkategorikan seorang angkatan kerja sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

BAB II. PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA

2.1 Partisipasi Dunia Kerja

Jumlah angkatan kerja mengambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian yaitu mereka yang sedang bekerja, sementara tidak bekerja, dan mereka yang menganggur.

Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Data angkatan kerja disajikan menurut jenis kelamin dan klasifikasi wilayah untuk memberikan profil distribusi penduduk yang tidak aktif secara ekonomi.

Tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Oleh sebab itu, partisipasi penduduk dalam angkatan kerja cenderung berbeda jika dilihat Antara beberapa variable demografi.

TPAK diitung dari persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Konsep Angkatan Kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, penduduk sementara tidak bekerja, dan penduduk yang menganggur. Penduduk

usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Berdasarkan sampel Sakernas Agustus 2017, diperoleh jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 33.956 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 20.734 penduduk yang tergolong angkatan kerja dan 13.222 penduduk yang bukan angkatan kerja.

TPAK Kabupaten Halmahera Tengah pada periode Agustus 2017 sebesar 61,06. Angka ini merupakan proporsi jumlah angkatan kerja (20.734 jiwa) terhadap jumlah penduduk usia kerja (33.956 jiwa). Data ketenagakerjaan selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Agustus 2017

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Penduduk Usia Kerja (15+)	17.399	16.557	33.956
Angkatan Kerja	13.346	7.388	20.734
Bekerja	13.165	6.751	19.916
Penganggur	181	637	818
Bukan Angkatan Kerja	4.053	9.169	13.222
TPAK	**76,71**	**44,62**	**61,06**

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2017

Tabel tersebut cukup jelas menggambarkan bahwa partisipasi laki-laki dalam pasar kerja lebih tinggi dibanding perempuan. TPAK laki-laki mecapai 76,71 persen sementara pada perempuan hanya 44,62 persen, hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 77 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan hanya sekitar 45 orang yang termasuk angkatan kerja.
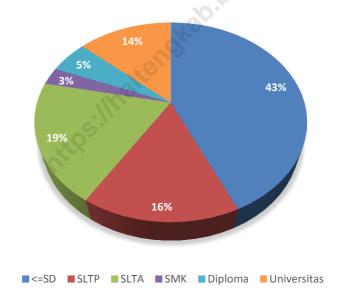
Gambar 2. Persentase Angkatan Kerja di Kabupaten HalmaheraTengah Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2017

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2017

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kualitas tenaga kerja. Indikator kualitas tenaga kerja yang dikumpulkan lewat Sakernas hanya mencakup tingkat pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan tingkat pendidikan, angkatan kerja di Kabupaten Halmahera Tengah masih didominasi penduduk berpendidikan SD ke bawah.

2.2 Penduduk Usia Kerja yang Bekerja

2.2.1 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status pekerjaan yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1) Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar.
2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dengan memperkerjakan buruh tidak tetap/pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Buruh/karyawan/pegawai tidak tetap adalah buruh/karyawan/pegawai yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dan hanya menerima upah berdasarkan banyaknya waktu kerja atau volume pekerjaan yang dikerjakan.
3) Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar. Buruh/karyawan/pegawai tetap/dibayar adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau intansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji/secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.
4) Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh

yang tidak mempunyai majikan tetap tidak digolongkan sebagai beruh/karyawan/pegawai, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan yang sama dalam sebulan terakhir. Khusus pekerja pada sektor bangunan dianggap buruh jika bekerja minimal tiga bulan pada satu majikan.

5) Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
6) Pekerja bebas di non-pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
7) Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Tabel 2. Persentase Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Status Bekerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2017

Status Bekerja	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Berusaha sendiri	23,49	16,56	21,14
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar	27,55	24,72	26,59
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	2,60	0,28	1,81
Buruh/karyawan/pegawai	25,97	28,47	26,82
Pekerja bebas di pertanian	3,85	0,00	2,55
Pekerja bebas di non pertanian	8,13	0,00	5,37
Pekerja keluarga/tak dibayar	8,41	29,97	15,72
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2017

Tabel di atas menunjukkan setengah dari total penduduk yang bekerja berstatus sebagai buruh/ karyawan/ pegawai. Hanya sebagian kecil yang berstatus sebagai pekerja keluarga/ tidak dibayar. Dari sisi jenis kelamin, persentase pekerja keluarga perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Dapat dimaklumi, biasanya dalam satu keluarga atau rumah tangga yang memiliki suatu usaha, pemilik usaha diatasnamakan suami (kepala rumah tangga) sedangkan istrinya sebagai pekerja keluarga.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat dihitung jumlah pekerja yang tergolong "Pekerja Rentan". Pekerja Rentan adalah mereka yang bekerja dengan status berusaha sendiri, pekerja bebas (baik di pertanian maupun non-pertanian), dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Dikatakan rentan sebab pekerjaan mereka sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan seperti cuaca atau fluktuasi ekonomi. Sebagai contoh, kondisi cuaca yang kurang baik menyebabkan nelayan terpaksa tidak melaut untuk sementara, produsen kue yang karena harga bahan-bahan naik, tidak berproduksi untuk sementara, dan sebagainya. Jumlah mereka yang tergolong pekerja rentan di Kabupaten Halmahera Tengah masih cukup banyak, yakni 8.918 orang (44,78 persen).

2.2.2 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Informasi sektoral atau lapangan usaha biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam berbagai literature pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju sector jasa.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang banyak menyerap tenaga kerja. Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu pertanian (*Agriculture*), industri (*Manufacture*), dan jasa (*service*), berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industry Classification* (ISIC) *System*.

- Lapangan usaha pertanian (*Agriculture*) terdiri dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan.
- Lapangan usaha industri (*Manufacture*) terdiri dari pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, serta konstruksi.
- Lapangan usaha jasa (*service*) terdiri dari perdagangan, transportasi, keuangan, dan jasa kemasyarakatan.

Kondisi lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Halmahera Tengah pada Agustus 2017 masih mempunyai pola yang sama dengan Agustus tahun sebelumnya, yaitu didominasi oleh sektor pertanian sebesar 42,11 persen. Selanjutnya adalah sektor jasa 29,78 persen, dan manufaktur sebesar 28,11 persen (Tabel 4)

Tabel 3. Persentase Penduduk Kabupaten Halmahera Tengah yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Agustus 2017

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	**45,90**	**34,72**	**42,11**
Manufaktur	**33,66**	**17,30**	**28,11**
Pertambangan	7,92	0,28	5,33
Industri	11,04	17,02	13,07
Listrik, Gas, dan Air	1,05	0,00	0,69
Konstruksi	13,64	0,00	9,02
Jasa-jasa	**20,44**	**47,98**	**29,78**
Perdagangan	7,00	19,79	11,33
Transportasi	0,62	0,00	0,41
Keuangan	1,03	1,30	1,12
Jasa Kemasyarakatan	11,79	26,88	16,91
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2017

2.2.3 Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam

kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time* (35 jam atau lebih dalam seminggu), sebagai persentase dari total penduduk bekerja. Walaupun jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu namun mereka tidak sedang mencari dan mempersiapkan usaha. Selain itu, pekerja paruh waktu juga tidak tersedia jika ada yang menawarkan pekerjaan lain. Dengan melihat jumlah jam kerja selama seminggu terakhir dari penduduk yang bekerja, kita dapat mengetahui proporsi penduduk yang bekerja sebagai pekerja murni/paruh waktu/pekerja tidak penuh dan proporsi penduduk yang bekerja namun dikategorikan sebagai setengah penganggur.

Di Indonesia seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh waktu (*full time worker*) apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu. Bila pekerja memiliki jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan lain itu termasuk setengah penganggur. Namun pekerja yang memiliki jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan tidak ingin mencari pekerjaan lain atau sudah merasa cukup itu termasuk pekerja paruh waktu (*part time worker*).

Hasil Sakernas Agustus 2017, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 27,98 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 28 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak punya keinginan untuk menambah pekerjaan (jam kerja). Sedangkan tingkat pekerja setengah penganggur mencapai 13,41 persen, yang berarti dari 100 orang yang bekerja, terdapat 13 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan. Hal tersebut seperti yang tercantum pada table di bawah ini.

Tabel 4. Peduduk yang Bekerja di Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Status Bekerja Berdasarkan Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2017

Status Bekerja	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Penduduk yang Bekerja	13.165	6.751	19.916
Pekerja Tidak Penuh (<35 jam)	4.735	3.509	8.244
1. Setengah Penganggur	2.153	518	2.671
2. Pekerja Paruh Waktu	2.582	2.991	5.573
Tingkat Pekerja Tidak Penuh (<35 jam) (%)	35,97	51,98	41,39
1. Tingkat Pekerja Setengah Penganggur (%)	16,35	7,67	13,41
2. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	19,61	44,30	27,98

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2017

Dapat dicermati pada gambar di bawah, pada Agustus 2017 secara umum di Kabupaten Halmahera Tengah lebih banyak penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk laki-laki. Persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya di bawah 35 jam per minggu mencapai 48,03 persen, sementara persentase pada laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 25,54 persen.
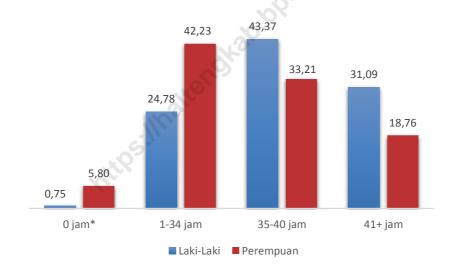
Gambar 3. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2017

*termasuk sementara tidak bekerja

Pada jam kerja 35-40 jam, persentase penduduk laki-laki lebih besar dibanding perempuan, yaitu 43,37 persen dibanding 33,21 persen.

Begitu pula untuk jam kerja di atas 40 jam per minggu persentase laki-laki lebih tinggi dibandingkan persentase perempuan, yaitu 31,09 persen dibanding 18,76 persen.

2.2.4 Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

Dalam analisis ketenagakerjaan penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggu jenjang pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi kurang tepat. Sebaliknya, karena tingginya permintaan tenaga kerja pada sektor informal atau jenis pekerjaan yang hanya mengandalkan fisik dan pendidikan rendah, maka mereka yang berpendidikan rendah justru dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
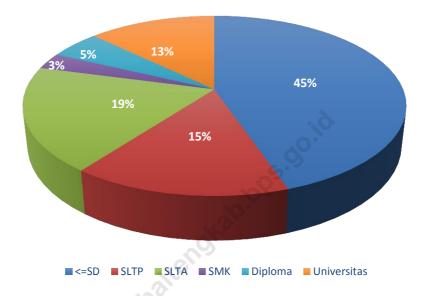
Gambar 4. Persentase Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2017

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2017

Pada periode Agustus 2017, sebagian besar penduduk yang bekerja di Maluku Utara adalah berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu 45 persen. Hal ini menggambarkan bahwa pekerja yang ada di Halmahera Tengah didominasi oleh penduduk dengan pendidikan maksimal adalah Sekolah Dasar.

Tabel 5. Persentase Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2017

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
<= SD	40,14	53,77
SLTP	18,69	9,42
SLTA	24,36	8,03
SMK	4,19	0,53
Diploma I/II/III	4,81	5,64
Universitas	7,82	22,60
Total	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2017

Berdasarkan tabel di atas, penduduk yang bekerja baik laki-laki maupun perempuan masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu 40,14 persen untuk laki-laki, dan 53,77 persen untuk perempuan.

2.2.5 Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (Employment to Population Ratio-EPR)

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja yang berstatus bekerja terhadap total penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi

mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk bekerja, sementara rasio yang rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan langsung dengan pasar, kemungkinan karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja.

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara, indikator ini menghasilkan analisis lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai indikasi positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Nilai indikator ini bahkan bisa saja tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif, misalnya keterbatasan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan membuat kaum muda lebih memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah. EPR yang tinggi, dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan masalah baru seperti: lapangan kerja akan kebanjiran tenaga kerja kurang terdidik yang mustahil bisa diserap secara maksimal oleh lapangan pekerjaan yang menghendaki kualifikasi pekerja terdidik.

Data EPR Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. EPR Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Agustus 2017

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Penduduk Usia Kerja (15+)	17.399	16.557	33.956
Angkatan Kerja	13.346	7.388	20.734
Bekerja	13.165	6.751	19.916
Penganggur	181	637	818
Bukan Angkatan Kerja	4.053	9.169	13.222
EPR	**75,66**	**40,77**	**58,65**

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2017

Angka EPR Kabupaten Halmahera Tengah pada Agustus 2017 sebesar 58,65. Berdasarkan angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada Agustus 2017 dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar 59 orang yang bekerja.

BAB III. INDIKATOR PENGANGGURAN

Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (excess supply) pada pasar kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahaya untuk memperoleh pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha. Tingginya angka TPT mencerminkan adanya kegagalan dalam pasar kerja untuk menyerap sejumlah angkatan kerja.

TPT atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan serta merta sebagai pengukuran kesulitan ekonomi. Korelasi antara pengangguran dan kemiskinan seringkali ada dan cenderung negatif, dimana tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin. Sebagai contoh seseorang dengan kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik cenderung memilih pekerjaan pada tingkat pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi serta akan memilih menganggur daripada bekerja meskipun kadang melewatkan lowongan pekerjaan yang bisa didapatkan dengan mudah di depan mata. Sementara penduduk miskin cenderung mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan yang tinggi dalam upaya mempertahankan hidup.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan kesejahteraan ekonomi. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan secara aktif atau tidak mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaan harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja dan indikasi kegagalan mencari pekerjaan. Untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi diperlukan indikator lain yang terkait seperti pendapatan.

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan diploma yaitu sebesar 9,63 persen. Dengan kata lain ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan diploma. Sementara mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT pada kelompok yang tidak pernah sekolah/tamat SD.

Tabel 7. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Agustus 2017

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
<= SD	0,26	0,93	0,54
SLTP	1,72	14,40	4,62
SLTA	0,00	34,06	6,95
SMK	0,00	0,00	0,00
Diploma I/II/III	0,00	22,09	9,63
Universitas	10,75	6,61	8,32
Halmahera Tengah	**1,36**	**8,62**	**3,95**

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2017

Berdasarkan jenis kelamin, lulusan universitas pada penduduk laki-laki menjadi penyumbang terbesar tingkat pengangguran. Namun pada penduduk perempuan, tingkat pengangguran tertinggi disumbang oleh lulusan SLTA. Sementara tingkat pengangguran terendah pada laki-laki maupun perempuan yaitu berasal dari lulusan SD ke bawah.

Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi pekerja dan kebijakan pendidikan. Logika awam mengatakan bahwa mereka yang berpendidikan rendah memiliki resiko yang lebih tinggi menjadi

pengangguran, meskipun data seringkali menunjukkan bahwa dugaan tersebut tidak selalu benar, khususnya di negara-negara berkembang yang lapangan pekerjaannya masih didominasi oleh sektor-sektor dengan daya serap tinggi terhadap pekerja berketerampilan rendah. Di sisi lain, tingkat pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan menuntut keahlian tinggi yang mampu menyerap jumlah mereka secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2015). Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia, Agustus 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2017). Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia, Agustus 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kota Ternate. (2015). Kota Ternate Dalam Angka 2015. Ternate: Badan Pusat Statistik Kota Ternate

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2017). Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2017. Ternate: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara.